



## **WALI KOTA CIREBON**

### **RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2019**

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Cirebon Tahun 2019. LPPD ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Masyarakat Kota Cirebon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### **I. PENDAHULUAN**

##### **A. Kondisi Geografis**

Kota Cirebon yang terletak di daerah pantai utara Propinsi Jawa Barat, mempunyai letak geografis yang strategis berada pada posisi 108,33° dan 6,41° lintang Selatan pada pantai Utara pulau Jawa bagian barat. Bentuk wilayah memanjang dari Barat ke Timur sekitar 8 kilometer, dan dari Utara ke Selatan sekitar 11 kilometer, dengan ketinggian dari permukaan laut 5 meter. Mempunyai luas wilayah administratif sebesar 37,35 km<sup>2</sup> atau 3.735,82 hektar, Kota Cirebon terdiri dari 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan, yang terbagi menjadi 249 RW dan 1.370 RT dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai Kedung Pane
- Sebelah Barat : Sungai Banjir Kanal / Kabupaten Cirebon
- Sebelah selatan : Sungai Kalijaga
- Sebelah Timur : Laut Jawa

## **B. Gambaran Umum Demografis**

Jumlah penduduk Kota Cirebon pada tahun 2019 ini mencapai 340.370 jiwa yang terdiri dari 170.584 laki-laki dan 169.786 perempuan, dari jumlah penduduk tersebut jumlah penduduk terbesar berusia antara 0 s/d 59 tahun sebanyak 306.427 jiwa atau 90,23%. Ini menunjukkan sebagian besar penduduk Kota Cirebon merupakan penduduk dengan usia produktif. (*Sumber data Disdukcapil Semester 2*)

## **II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)**

### **A. Visi dan Misi**

RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 merupakan tahap ke-empat dari RPJPD Kota Cirebon Tahun 2005-2025. Pada tahap ini fokus pembangunan diarahkan pada upaya Pemanjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam mewujudkan Kota Cirebon yang maju dan sejahtera berlandaskan keimanan dan ketaqwaan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan demikian, visi pembangunan jangka menengah pada tahun 2018-2023 harus mengacu pada fokus pembangunan tersebut agar terwujud perencanaan pembangunan yang sinkron, konsisten dan berkelanjutan. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Cirebon Tahun 2018 – 2023 adalah :

***“ SEHATI Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah ”***

maka untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Misi Ke-1: “ Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya saing, Berbudaya dan Unggul Dalam Segala Bidang ”

Misi Ke-2: “ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif ”

Misi Ke-3: “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan ”

Misi Ke-4: “ Mewujudkan ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif ”

### **B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara berjangka, maka dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2019, telah ditetapkan prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berkelanjutan.
3. Pemajuan kebudayaan dan pengembangan destinasi pariwisata.
4. Peningkatan produktifitas dan daya saing ekonomi.

5. Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
6. Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum.

### **III. URUSAN KONKUREN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **A. Urusan Konkuren**

##### **A.1. Urusan Wajib**

###### **A.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

###### **1. Urusan Pendidikan**

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Pendidikan sebesar Rp. 209.250.574.110,00 dengan realisasi sebesar Rp. 206.863.000.576,00 atau 98,86%.

###### **2. Urusan Kesehatan**

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Kesehatan sebesar Rp. 987.599.059.290,00 dengan realisasi sebesar Rp. 859.016.058.956,00 atau 86,98%.

###### **3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 361.644.177.590,00 dengan realisasi sebesar Rp. 259.125.292.236,00 atau 71,65%.

###### **4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp. 7.408.760.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.117.265.432,00 atau 96,07%.

###### **5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp. 38.085.266.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 36.144.413.016,00 atau 94,90%.

###### **6. Urusan Sosial**

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Sosial sebesar Rp. 5.835.999.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.676.472.378,00 atau 96,16%.

## **A.1. 2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

### **1. Urusan Tenaga Kerja**

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Tenaga Kerja sebesar Rp. 4.991.488.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.804.139.988,00 atau 96,25%.

### **2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp. 1.116.851.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.114.651.500,00 atau 99,80 %.

### **3. Urusan Pangan**

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Pangan sebesar Rp. 6.782.775.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.473.530.320,00 atau 95,44%.

### **4. Urusan Lingkungan Hidup**

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 42.259.564.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 40.567.421.766,00 atau 96%.

### **5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp. 6.979.890.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.760.532.958,00 atau 96,86 %.

### **6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp. 26.635.525.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 26.087.908.414,00 atau 97,94%.

### **7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp. 8.638.528.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.773.050.638,00 atau 78,41 %.

### **8. Urusan Perhubungan**

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Perhubungan sebesar Rp. 33.683.488.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 32.072.090.820,00 atau 96,06 %.

## **9. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 18.032.260.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.321.548.974,00 atau 94,86 %.

## **10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp. 1.949.420.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.718.372.000,00 atau 88,15%.

## **11. Urusan Penanaman Modal**

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Penanaman Modal sebesar Rp. 4.827.608.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.659.849.252,00 atau 96,53%.

## **12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp. 7.040.678.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.799.675.916,00 atau 96,58%.

## **13. Urusan Statistik**

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Statistik sebesar Rp. 427.372.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 424.921.000,00 atau 99,43%.

## **14. Urusan Persandian**

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Persandian sebesar Rp. 117.450.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 112.580.000,00 atau 95,85%.

## **15. Urusan Kebudayaan**

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Kebudayaan sebesar Rp. 4.109.987.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.991.541.200,00 atau 97,12%.

## **16. Urusan Perpustakaan**

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Perpustakaan sebesar Rp. 7.502.040.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.167.626.394,00 atau 95,54%.

## **17. Urusan Kearsipan**

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Kearsipan sebesar Rp. 985.630.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 981.430.300,00 atau 99,57%.

## **A.2. Urusan Pilihan**

### **1. Kelautan dan Perikanan**

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 2.035.322.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.002.581.000,00 atau 98,39%.

### **2. Pariwisata**

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Pariwisata sebesar Rp. 3.542.580.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.448.834.760,00 atau 97,35%.

### **3. Pertanian**

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Pertanian sebesar Rp. 5.964.801.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.763.279.234,00 atau 96,62%.

### **4. Perdagangan**

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Perdagangan sebesar Rp. 9.315.335.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.874.092.926,00 atau 95,26%.

### **5. Perindustrian**

Alokasi anggaran belanja langsung Urusan Perindustrian sebesar Rp. 1.343.776.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.271.023.600,00 atau 94,59%.

## **B. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

### **1. Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**

Alokasi anggaran belanja langsung Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan sebesar Rp. 67.172.560.845,00 dengan realisasi sebesar Rp. 62.600.027.891,00 atau 93,19%.

### **2. Fungsi Penunjang Pengawasan**

Alokasi anggaran belanja langsung Fungsi Penunjang Pengawasan sebesar Rp. 2.676.694.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.364.854.901,00 atau 88,35%.

### **3. Fungsi Penunjang Perencanaan**

Alokasi anggaran belanja langsung Fungsi Penunjang Perencanaan sebesar Rp. 5.051.518.550,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.256.769.180,00 atau 84,27%.

### **4. Fungsi Penunjang Keuangan**

Alokasi anggaran belanja langsung Fungsi Penunjang Keuangan sebesar Rp. 12.231.565.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.118.944.248,00 atau 96,26%.

## **5. Fungsi Penunjang Kepegawaian**

Alokasi anggaran belanja langsung Fungsi Penunjang Kepegawaian sebesar Rp. 4.675.028.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.281.943.321,00 atau 91,59%.

## **6. Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan**

Alokasi anggaran belanja langsung Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp. 2.318.328.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.285.443.900,00 atau 98,58 %.

## **7. Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan**

Alokasi anggaran belanja langsung Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp. 584.347.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 549.431.000,00 atau 94,02%.

# **IV. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

## **1. Kerjasama Antar Daerah dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga**

Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada Tahun 2019 telah menyelenggarakan 9 (Sembilan) kerjasama antar daerah dan 34 (tiga puluh empat) kerjasama dengan pihak ketiga.

## **2. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah**

### **a. Forum Koordinasi**

Harmonisasi antar pimpinan daerah menjadi suatu hal yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan yang semakin kompleks. Berkenaan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan komunikasi dan hubungan kerja antara Legislatif, Eksekutif dan para pimpinan daerah lainnya. Komunikasi itu dilaksanakan dalam bentuk Musyawarah Pimpinan Daerah lainnya. Komunikasi itu dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida)
- b. Komunikasi Intelejen Daerah (Kominda)
- c. Rapat Koordinasi lainnya.

### **b. Materi Koordinasi**

Materi yang menjadi pokok bahasan pada saat Koordinasi dengan Instansi Vertikal antara lain :

1. Rencana Kegiatan Forkopimda Kota Cirebon;
2. Evaluasi Kegiatan Forkopimda Tahun 2019;

3. Evaluasi Kegiatan Forkopimda bulan Februari 2019, dan Rencana Kegiatan Forkopimda pada bulan Maret 2019;
4. Evaluasi Kegiatan bulan Maret 2019 dan rencana Kegiatan pengamanan pemilu serentak Pilpres dan Pileg tanggal 17 April 2019;
5. Evaluasi kegiatan bulan April 2019 dan pasca pengamanan Pilpres dan Pileg 2019;
6. Evaluasi kegiatan bulan Mei 2019 dan pasca pengamanan Pilpres dan Pileg 2019;
7. Pasca pengamanan arus balik Lebaran idul Fitri 2019 serta menjaga kondusifitas Kota Cirebon yang aman dan damai;
8. Membangun sinergitas komunikasi antar pimpinan daerah;
9. Bersinergi untuk menjaga masyarakat Kota Cirebon dalam menciptakan situasi yang tetap kondusif;
10. Meningkatkan koordinasi dan informasi tentang isu-isu penolakan perpindahan ibukota terhadap sisi ekonomi, sosial dan budaya di Kota Cirebon;
11. Meningkatkan dan informasi tentang isu-isu hoak dalam mengantisipasi persiapan pelaksanaan elantikan Presiden;
12. Meningkatkan koordinasi dan pasca pengamanan Tradisi Muludan di Kota Cirebon;
13. Meningkatkan koordinasi dan pengamanan Natal dan Tahun baru 2020 di Kota Cirebon;
14. Meningkatkan Koordinasi dalam pengamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat (Kantrantibmas) di Kota Cirebon.

Melalui Komunikasi dan koordinasi yang baik antara pimpinan daerah ini, maka diharapkan akan tercipta kinerja Pemerintahan yang baik dalam suasana yang kondusif, aman dan terkendali.

### **3. Pembinaan Batas Wilayah**

Batas Wilayah di Kota Cirebon dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat sehingga dengan demikian permasalahan batas wilayah antara kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon menjadi jelas.

Dengan adanya Permendagri Nomor 75 Tahun 2018 maka manfaat yang dapat dirasakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon antara lain :

- a. Sebagai landasan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, dengan



semakin jelasnya wilayah administratif suatu daerah.

- b. Sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan.
- c. Sebagai pedoman dalam pelayanan publik, sudah ada ketetapan final terkait batas wilayah administratif antara lain : kependudukan, kesehatan, pendidikan, adm pertanahan, penataan infrastruktur daerah dll.
- d. Sebagai landasan dalam penataan ruang ( RTRW, RDTR)
- e. Dapat diketahui luas wilayah administratif yg valid.

Kondisi eksisting sekarang terkait batas daerah, telah dilaksanakan pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) dan Pilar Antar Batas Utama (PABU) sejumlah 29 titik, Sedangkan berdasarkan Permendagri 75 tahun 2018 terdapat 3 Pilar Batas Utama (PBU), 8 Pilar Antar Batas Utama (PABU), dan 82 Titik Koordinat (TK), sehingga perlu dilakukan pemasangan pilar batas pada 64 titik koordinat lagi.

#### **4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**

Sepanjang tahun 2019, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah terjadi 77 bencana di wilayah Kota Cirebon baik yang merupakan bencana alam maupun karena kelalaian manusia. Meskipun begitu, bencana yang terjadi di wilayah Kota Cirebon bersifat lokal, dan relarif dapat ditangani dengan cepat.

Anggaran yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon antara lain pada :

- a. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, sebesar Rp. 4.048.612.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.735.279.578,00 atau sebesar 92,26%
- b. Dinas Pemadam Kebakaran pada kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran sebesar Rp. 16.193.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.965.136.584,00 atau sebesar 98,59%
- c. Satuan Polisi Pamong Praja dengan kegiatan pengidentifikasian Potensi Rawan Bencana dan Penanggulangan Serta Pemulihan Pasca Bencana sebesar Rp. 12.768.466.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.514.401.066,00 atau 90,18%
- d. Dinas kesehatan dengan kegiatan Penguatan Jejaring Tim Siaga Bencana dan Kegawatdaruratan sebesar Rp. 987.599.059.290,00 dengan realisasi 859.016.058.956 atau 86,98%
- e. Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan kegiatan

Penanggulangan Masalah - Masalah Strategi Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa sebesar Rp. 5.835.999.400,00 dengan realisasi Rp. 5.676.472.378,00 atau sebesar 97,27 %.

Antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Cirebon dalam menghadapi bencana antara lain :

- a. Penyiapan Personil Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana;
- b. Kesigapan Terhadap Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana;
- c. Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran;
- d. pengidentifikasian Potensi Rawan Bencana dan Penanggulangan Serta Pemulihan Pasca Bencana;
- e. Penguatan Jejaring Tim Siaga Bencana dan Kegawat daruratan;
- f. Penanggulangan Masalah - Masalah Strategi Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa.

## **5. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Dalam implementasinya tugas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Cirebon dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, secara umum kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diarahkan kepada 2 (dua) hal pokok, yaitu:

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum melalui sosialisasi kebijakan dan peraturan serta operasi penertiban.
2. Pembinaan masyarakat melalui pengawasan, pengamanan, penataan potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

## **VI. PENUTUP**

Pada akhir penyampaian RLPPD ini, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kota Cirebon mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan kota di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan visi Kota Cirebon yaitu SEHATI Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah.

Pemerintah Kota Cirebon menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan sampai saat ini belum sepenuhnya dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan menyelesaikan semua persoalan secara menyeluruh, hal ini bukan dikarenakan kurangnya perhatian terhadap aspirasi masyarakat, namun dikarenakan keterbatasan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, melalui penyampaian Informasi LPPD ini kami mohon maaf atas kekurangan, dan kepada semua pihak

diharapkan memberikan kritik, saran dan masukan yang konstruktif guna perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah pada tahun mendatang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami, atas nama Pemerintah Kota Cirebon mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama yang baik antara, Pemerintah Kota Cirebon, masyarakat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu per satu atas terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan pada Tahun Anggaran 2019 di Kota Cirebon, Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Cirebon, 23 Maret 2020

WALI KOTA CIREBON



**Drs. H. NASHRUDIN AZIS, SH**